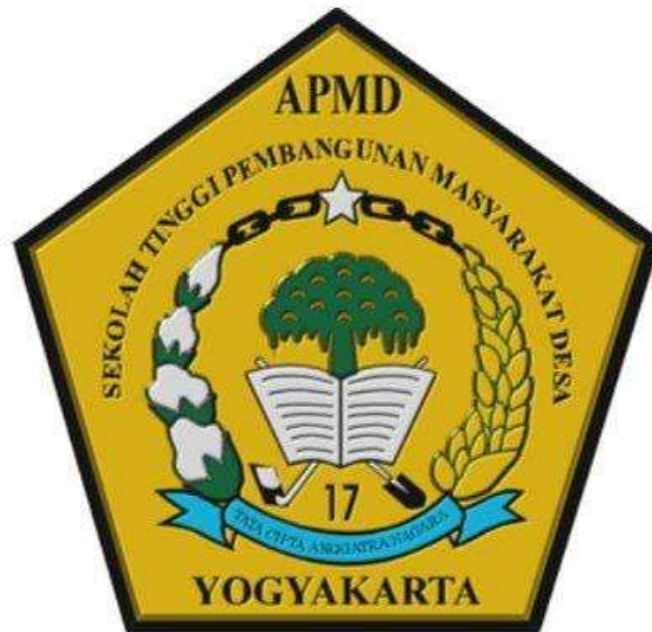


**REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN KALURAHAN DI
KALURAHAN SRIHARJO, KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Aisyah Fajar Rochani

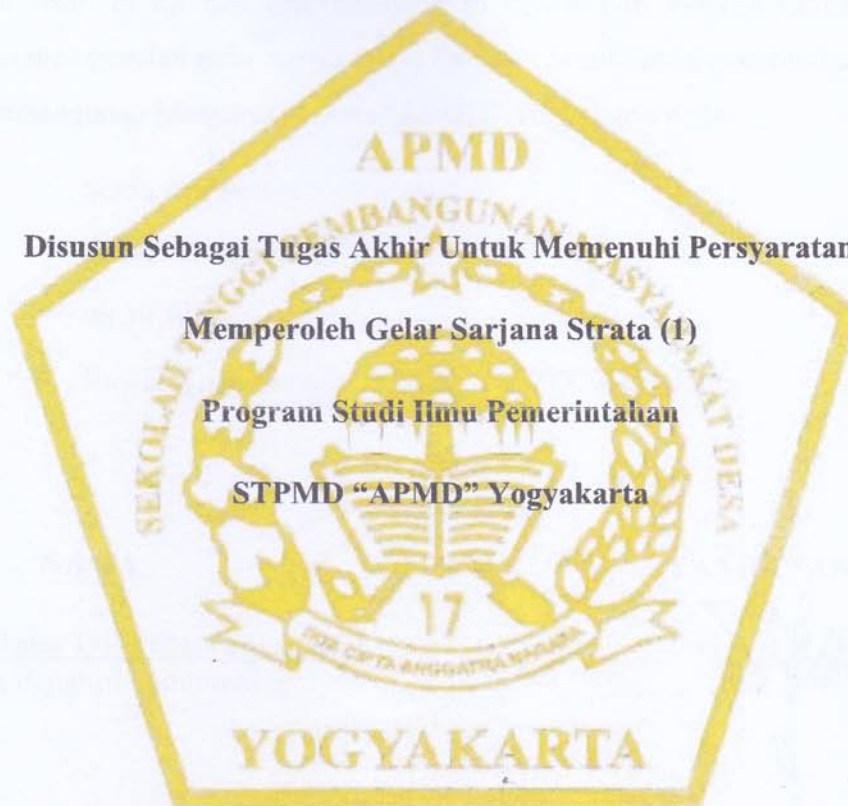
19520001

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

**REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN KALURAHAN DI
KALURAHAN SRIHARJO, KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Aisyah Fajar Rochani

19520001

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin dan Selasa

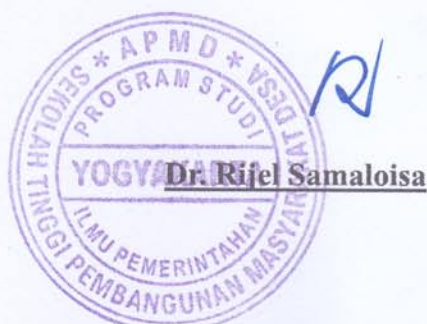
Tanggal : 12 dan 13 Juni 2023

Waktu : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	
2. <u>Dra. Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping 1	
3. <u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Penguji Samping 2	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Fajar Rochani

NIM : 19520001

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *“Representasi Perempuan Dalam Kelembagaan Kalurahan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”* adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Aisyah Fajar Rochani
19520001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Representasi Perempuan Dalam Kelembagaan Kalurahan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”**

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mengajarkan tentang sebuah perjuangan untuk bangsa, negara, daerah, dan desa di Indonesia.
2. Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak arahan dalam penulisan skripsi.
3. Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memimpin dalam penyelenggaraan studi Ilmu Pemerintahan.
4. Pemerintah Kalurahan Sriharjo, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Sriharjo, Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo, beserta Masyarakat Sriharjo yang telah memberikan dukungan dalam bentuk data dan informasi bagi penelitian penulis.
5. Seluruh keluarga Civitas Akademis Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan harapan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi referensi pengetahuan bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat membantu.

Yogyakarta, 05 Juni 2023
Penulis



Aisyah Fajar Rochani

19520001

MOTTO

“Hasil perjuanganlah yang nantinya akan aku persembahkan, atas setiap yang aku relakan”

(Aisyah Fajar Rochani)

“Jangan terlalu kepikiran. Karena apa? Itu bukan barang untuk dipikir. Itulah dinamika, anggap saja itu sebagian dari proses”

(Fais Hakim Rasyid)

“Jika perempuan diumpakan bunga. Maka jadilah bunga revolusi, bunga perjuangan, bunga pembebasan, dan bunga kemandirian. Bukan bunga pajangan di sudut ruangan”

(Fanda Puspitasari)

“Vivere Pericoloso”

(Bung Karno)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sadar, sehat, dan bahagia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah hadir dalam kehidupan penulis:

1. Kedua orang tua (Bapak Mardi dan Ibu Karsi) yang selalu memberikan doa dalam setiap langkah perjuangan penulis, serta ketiga kakak (Mas Anton, Mas Anang, Mbak Isna) yang telah memberikan dukungan.
2. Untuk Simbah Kakung (almarhum) yang dahulu selalu berpikir penulis sekolah tidak selesai-selesai semoga setelah ini dapat melanjutkan studi kembali dan Simbah Dungkasi (almarhumah) yang selalu memberikan doa dan kepercayaan agar menjadi orang yang sukses.
3. Kakak Ipar (Mas Dani beserta ibunya yang selalu memberikan support, Mbak Ani dan Mbak Dedeh) serta keponakan (Kembar Rava dan Ravi, Naila, Faishal, Keenan) yang telah menghibur dan memberikan semangat.
4. Keluarga besar Trah Karyorejo dan Trah Karyono yang telah memberikan doa dan harapan kepada penulis.
5. Pemerintah Republik Indonesia yang telah membiayai penulis dalam menempuh Pendidikan melalui beasiswa Bidikmisi.
6. Terima kasih kesekian kali kepada Ibu Safitri Endah Winarti dan Bapak Budi Prasetyo Widyobroto sekeluarga selaku orang tua penulis di Jogja yang telah

memberikan banyak dukungan serta pertolongan baik moril maupun materiil.

Semoga Allah membalas semua amal baik Ibu Safitri Sekeluarga.

7. Guru ideologis penulis Mas Yos Soetyoso yang telah memberikan dorongan untuk terus belajar dan mengajarkan tentang arti perjuangan.
8. Kakak dan Abang (Arjuna Putra Aldino, Uldan Tajri, Fais Hakim Rasyid, Jefhorison, Budi Tara, Iskandar, Ahmad Fauzi Shabirin, Fanda Puspitasari) yang telah membimbing, memberikan pengalaman, dan mendorong agar terus belajar, membaca, menulis dan berargumentasi dalam bingkai 'pejuang-pemikir, pemikir-pejuang'.
9. Kawan-kawan seperjuangan (Galuh Kusuma, Ardian Sunarma, David Nur Rahmad, Litansia, Finka Aulina, Artista, dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu) yang telah berdiskusi bersama penulis.
10. Saudara tak sekandung Annisa Uswatun Khasanah dan Niken Ayu Nurhani yang telah menemani maupun membantu secara materiil.
11. Miftahul Noor Syahbana yang telah memberikan tekanan dalam setiap langkah perjuangan saya, terima kasih mas atas setiap doa, dukungan, dan harapan. Bagi saya Mas adalah teman terbaik dalam perjalanan hidup saya!

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Fokus Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Literatur Review	14
G. Kerangka Konseptual.....	18
1. Representasi	18
2. Kelembagaan Desa/Kalurahan.....	23
3. Gender.....	25
4. <i>Governance</i>	28
H. Metodologi Penelitian.....	30
a) Jenis Penelitian	30
b) Objek dan Subjek Penelitian.....	31

c) Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
d) Teknik Pengumpulan Data.....	33
I. Teknik Analisis Data.....	36
BAB II PROFIL KALURAHAN SRIHARJO	37
A. Sejarah Kalurahan.....	37
B. Hubungan Sosial Ekonomi Kalurahan	38
C. Organisasi Kelembagaan	39
D. Pemerintahan Kalurahan.....	43
E. Kondisi Demografis.....	45
F. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo Tahun 2023	48
G. Rencana Kerja Program Keistimewaan	48
BAB III ANALISIS DATA.....	50
1. Representasi Formal Dalam Kelembagaan Kalurahan.....	50
2. Representasi Substantif Dalam Kelembagaan Kalurahan	57
3. Representasi Deskriptif Dalam Kelembagaan Kalurahan	71
4. Representasi Simbolik Dalam Kelembagaan Kalurahan.....	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan.....	33
Tabel 2. 1 Data Personalia Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo.....	42
Tabel 2. 2 Data Personalia Pemerintah Kalurahan Sriharjo	44
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	46
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	47

INTISARI

Peran dan kedudukan perempuan di masyarakat sebagian masih dikatakan sebagai “konco wingking/*second class*”. Secara formal menunjukkan bahwa perempuan sudah mampu menduduki jabatan politik. Kalurahan Sriharjo pernah menjadi salah satu Kalurahan di Kabupaten Bantul yang mengalami kemiskinan tinggi. Kondisi tersebut mempengaruhi arah pembangunan Kalurahan Sriharjo untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, terdapat program dari Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya terdapat salah satu pilar yaitu Desa Prima diwakili oleh pengurus dan anggota, yang merupakan desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Penyelenggaraan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berhak dalam menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Namun, terkadang efek dari representasi ternyata banyak yang tidak sesuai karena melahirkan representasi semata, tidak benar-benar mewakili. Perempuan di Kalurahan Sriharjo telah banyak yang terlibat dalam kelembagaan Kalurahan dan Pengurus serta anggota Desa Prima. Akan tetapi, hadirnya perempuan dalam ruang publik diharapkan tidak hanya sekadar hadir, melainkan mampu bertindak untuk mereka yang diwakili. Berdasarkan kondisi tersebut penulis dapat menarik rumusan masalah yaitu, bagaimana representasi perempuan dalam kelembagaan kalurahan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive dan subjek penelitian Pemerintah Kalurahan Sriharjo, serta lembaga kemasyarakatan desa diantaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karangtaruna, dan Desa Prima. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data interpretatif dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, pengambilan data dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa kehadiran perempuan dalam kelembagaan Kalurahan yang diwakili oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) masuk ke dalam keempat kategori representasi, yaitu representasi formal, substantif, deskriptif, dan simbolik. Berdasarkan hasil analisis, ternyata kehadiran perempuan dalam kelembagaan Kalurahan telah mampu hadir secara substantif berdiri dan bertindak untuk mereka yang diwakili dilihat dari kemampuan dalam memperjuangkan saluran kepentingan-kepentingan perempuan meskipun dalam pengurus dan anggota Desa Prima masih terdapat anggota yang tidak aktif, tetapi anggota yang aktif telah memberikan dampak substantif kepada warga perempuan.

Kata Kunci : *Representasi Perempuan, Kelembagaan Kalurahan, Governance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah gender dewasa ini masih dipahami secara sempit oleh beberapa masyarakat, termasuk istilah jenis kelamin yang masih banyak disalahartikan dengan menyamakan istilah gender. Padahal keduanya merupakan istilah yang berbeda. Secara konsep, gender merupakan sifat atau karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh konstruksi sosial maupun kultural, sebagai contoh, perempuan dikenal lemah-lembut dan emosional, dan laki-laki lebih dikenal rasional dan perkasa, sedangkan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan jelas memiliki perbedaan secara biologis. Artinya peran gender ialah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin seperti halnya peran kodrati, melainkan dapat dipelajari melalui sosialisasi, oleh sebab itu gender dapat berubah seiring berjalannya waktu. Karenanya dalam pembagian peranan antara laki-laki dengan perempuan tidak dapat dipisahkan hanya karena alasan perbedaan gender, sebab pada posisi ini ketika disalahartikan akan menjadi bias akan pemahaman yang pada akhirnya mengarah pada generalisasi akan sebuah makna terhadap istilah gender.

Kurangnya pemahaman tentang pengertian gender menjadi salah satu penyebab pertentangan menerima suatu analisis gender di suatu

persoalan ketidakadilan sosial. Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender, dengan ditandai tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan, sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil. Secara proporsional dapat ditinjau berdasarkan representasi gender dalam mewakilkan tentang keadaan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang berkembang di lingkungan sosial atau masyarakat. Merujuk pada pandangan Hanna F. Pitkin (1976), representasi dikelompokkan ke dalam 4 (empat) konsep. Pertama, Representasi formal, sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal seperti parlemen. Kedua, Representasi substantif, dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk mereka yang diwakili. Ketiga, Representasi deskriptif, dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk orang-orang yang secara objektif serupa. Keempat, Representasi simbolik, jika wakil berdiri untuk mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik.

Pada tataran kelembagaan, desa memiliki posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga dalam mewujudkan pembangunan desa perlu adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Dasar telah menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang tertuang pada alinea keempat yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." Bangsa Indonesia yang dimaksud adalah seluruh elemen bangsa Indonesia termasuk di dalamnya perempuan dan laki-laki.

Berbicara mengenai kebijakan desa tentu akan berpengaruh kepada pembangunan desa. Keterbukaan akses kepada perempuan yang hadir hanya sekadar simbol membuat para perempuan ibaratkan sebuah patung dalam forum atau hanya dihadirkan untuk memenuhi kuota kehadiran perempuan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa menjadi ruang untuk seluruh elemen masyarakat menyampaikan dan mendiskusikan aspirasi demi membangun Desa. Namun, terkadang kehadiran perempuan hanya sebagai simbol karena perempuan tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka. Musyawarah yang seharusnya menjadi saluran kepentingan berbagai pihak justru hanya menguntungkan segelintir orang. Secara substantif perempuan belum maksimal dalam bertindak untuk mereka yang diwakili. Pada bagian ini perempuan hanya sebagai representasi simbolik. Melalui kebijakan menjadi pijakan awal dalam proses pembangunan. Kebijakan yang dibuat sudah seharusnya mampu mengakomodir kepentingan semua orang.

Namun, pada realitas yang ada justru kebijakan yang dibuat mengarah kepada kepentingan sebelah pihak. Pembangunan yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik justru tidak mampu menjawab persoalan.

Peran dan kedudukan perempuan di masyarakat sebagian masih seperti yang digambarkan pada cerita sinetron. Mereka bersembunyi dalam rumah, bahwa urusan perempuan hanyalah dapur, sumur, kasur. Pada sisi lain terlihat adanya usaha memperkuat kedudukan perempuan sebagai konco wingking. Di dalam Budaya Jawa pernah dijumpai pemikiran bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi karena pada akhirnya akan kembali ke dapur. Terdapat pandangan bahwa perempuan itu menerima dan laki-laki memberi. Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa ketika perempuan diposisikan sebagai orang yang menerima atau dalam Bahasa Jawanya *nompo* seolah dalam hidupnya dia sepenuhnya hanya berhak menerima. Menerima ketika perempuan itu didiskriminasi, ditindas, dan diperlakukan sesuka hati. Bergesernya waktu bentuk-bentuk penindasan, diskriminasi dibungkus dengan berbagai macam topeng yang membuat hal tersebut terjadi secara halus. Bergesernya waktu, perempuan Indonesia telah mengalami kemajuan, perempuan mulai terlibat dalam berekspresi, bersuara, dan terlibat dalam masyarakat. Jikalau dulu seorang jabatan pemimpin diduduki oleh laki-laki, saat ini sudah banyak perempuan menjadi seorang pemimpin, baik dalam tingkatan nasional maupun lokal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Guno

Tri Tjahjoko, MA Tahun 2018 dengan judul Perempuan Merebut Kekuasaan : Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Sriharjo Kabupaten Bantul, TIK selaku kepala desa yang menjabat saat ini menang tanpa menggunakan politik uang (*money politic*). Hal tersebut telah meruntuhkan konstruksi sosial bahwa seorang pemimpin hanya dapat diduduki oleh laki-laki. Secara formal menunjukkan bahwa perempuan sudah mampu menduduki jabatan politik. Akan tetapi, hadirnya perempuan dalam ruang publik diharapkan tidak hanya sebatas representasi formal, melainkan perempuan secara substantif mampu bertindak untuk mereka yang diwakili.

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2017 mencapai 3.762.167 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,46% dan penduduk perempuan 50,54%. Di lain sisi, jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat pada bulan Maret 2017 adalah 466 ribu jiwa atau sekitar 12,36% (BPS DIY, 2018). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak perempuan. Kemiskinan berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam memutus rantai kemiskinan. Perempuan secara kultural memegang peranan penting baik dalam keluarga maupun masyarakat, karena selama ini perempuan lebih banyak bersinggungan dalam aktivitas keluarga dan masyarakat. Pada aktivitas tersebut perempuan masih mengalami beberapa persoalan. Sebagai anggota keluarga baik sebagai ibu rumah tangga atau anak perempuan, mereka masih dianggap sebagai *second class*, posisi perempuan dalam ranah keluarga dikesampingkan.

Pengambilan keputusan yang seharusnya dapat dimusyawarahkan bersama tetapi perempuan tidak diberikan akses untuk mengutarakan pendapat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagai anggota masyarakat perempuan yang dianggap second class mengakibatkan menurunnya tingkat partisipasi dalam ruang publik. Banyak aktivitas yang bersinggungan dengan perempuan di Desa yang dianggap sebelah mata. Misalnya, dalam kegiatan posyandu (pos pelayanan terpadu) yang merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak hampir seluruhnya dikelola oleh ibu-ibu. Di bidang kesehatan, hampir seluruhnya yang menjadi kader-kader kesehatan adalah perempuan.

Kemiskinan menjadi isu krusial bagi negara Indonesia yang perlu diselesaikan. Selain kota pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang dikenal sebagai kota pariwisata. ketika berbicara mengenai sektor wisata tentu berpandangan bahwa masyarakatnya makmur dan sejahtera. Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kabupaten yang menyumbangkan penduduk miskin terbanyak. Tahun 2015 hingga 2019 Kabupaten Bantul telah mengalami penurunan data kemiskinan, tetapi kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021.

Kalurahan Sriharjo merupakan salah satu Kalurahan di Kabupaten Bantul yang mengalami kemiskinan tinggi. Kalurahan Sriharjo khususnya di Padukuhan Miri disebut sebagai Kalurahan miskin dan terisolasi karena terbatasnya fasilitas transportasi yang menghubungkan Kalurahan tersebut

dengan dunia luar. Sebanyak dua pertiga penduduk di Padukuhan Miri termasuk miskin dan sepertiga lain termasuk cukupan (Masri Singarimbun dan D.H Penny, 1969-1970). Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa Kalurahan Sriharjo pernah menjadi desa/kalurahan yang miskin. Fenomena tersebut berbeda dengan kepemimpinan seorang lurah perempuan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul saat ini. Seorang perempuan yang mampu mendobrak konstruksi budaya yang telah lampau dengan membuktikan bahwa beliau mampu menjadi seorang lurah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Lurah pertama adalah Sostro Margono yang menitik beratkan pada pembentukan dan penataan pemerintahan. Lurah berikutnya, Wardo Sumiyarsono, yang fokus pada administrasi pemerintahan. Lurah ketiga, Dimun, BC. HK, yang mengurus instruksi yang datang dari pusat. Lurah keempat, Supardijana, fokus pada pembangunan fisik. Kemudian lurah kelima, Edy Gunawan, yang juga fokus pada pembangunan fisik. Lurah keenam Sukadjo ini juga fokus pada pembangunan fisik. Lurah ketujuh adalah Titik Istiyawatun Khasanah S.I.P dengan periode 2018-2024. Pada masanya, Titik dikenal inovasinya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa Sriharjo (Ari Surida, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa/Kalurahan berhak dalam menetapkan dan mengelola kelembagaan Kalurahan. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Rukun tetangga dan rukun warga

memiliki aktivitas yang sedikit sehingga dalam penelitian ini diabaikan sehingga diwakilkan oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal).

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan agar terlibat dalam pembangunan dengan tujuan kesejahteraan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kalurahan Sriharjo sangat mendukung pembangunan Pemerintahan Kalurahan Sriharjo melalui kegiatan yang beragam meliputi kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima, Desa Bina Keluarga Sakinah (DBKS), B3A (Beragam, Bergizi, Berimbang, dan Aman), Posyandu Lansia, Posyandu Balita, Penanggulangan Desa Bebas 4 (empat) Masalah Kesehatan (DB4MK), Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), serta di bidang pendidikan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu wadah partisipasi perempuan yang diharapkan menjadi saluran kepentingan-kepentingan perempuan. Pada realitas yang ada masih mengalami berbagai macam kendala. Hasil wawancara mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta pada tanggal 16 November 2021 kepada Lurah Kalurahan Sriharjo mendapatkan informasi bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di sana masih banyak tetapi dalam penanganan masih belum maksimal, selain itu masih adanya pernikahan dini yang diakibatkan

oleh kehamilan di luar nikah. Hal semacam itu menjadi penting untuk diperhatikan. Terkait dengan persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kalurahan Sriharjo sendiri sudah memiliki forum Penghapusan KDRT. Ruang partisipasi masyarakat juga dibuka seluas-luasnya dalam Karang Taruna. Keberadaan Karang Taruna menjadi ruang partisipasi terutama bagi kalangan pemuda. Karang Taruna di Kalurahan Sriharjo bernama Karang Taruna Sedyo Bakti. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Karang Taruna di antaranya dari segi kesenian, budaya, dan agama. Pemuda Kalurahan Sriharjo dapat dikatakan memiliki berbagai macam potensi, salah satunya dalam mendesain gambar atau logo.

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan Pemerintah Kalurahan membuka ruang partisipasi melalui Musyawarah Kalurahan. Anggota BPKal di Kalurahan Sriharjo berjumlah 7 (tujuh) orang di antaranya dua orang perempuan terdiri dari satu orang keterwakilan wilayah dan satu orang keterwakilan perempuan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki komitmen dalam membangun desa yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang melibatkan berbagai pihak guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya terdapat beberapa bagian di antaranya aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan perempuan. Kemudian dikembangkan

menjadi Desa/Kalurahan Budaya, Desa Prima, dan Desa Preneur. Desa Prima dengan pengarusutamaan kesetaraan gender dan menggiatkan pengembangan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Desa Prima atau Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Kalurahan Sriharjo sudah ada sejak tahun 2009 hingga sekarang. Keanggotaan Desa Prima meningkat setiap tahun dari awalnya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang hingga sekarang mencapai 62 (enam puluh dua) orang. Akan tetapi, banyaknya anggota belum menjamin organisasi tersebut berjalan dengan maksimal. Fakta yang terjadi banyaknya anggota tersebut ternyata belum semua bertanggung jawab pada masing-masing bidang. Situasi perempuan di Kalurahan Sriharjo dalam aspek perekonomian perempuan memiliki peranan yang penting karena mereka yang memiliki kendali dalam usaha. Hal tersebut dapat dilihat pada masa pandemi Covid-19 mereka lebih mampu *survive* dalam kehidupan. Pada perjalanannya tetap berkolaborasi dengan laki-laki, akan tetapi perempuan lebih banyak berkontribusi ketimbang laki-laki. Padahal, kehadiran kelembagaan desa/kalurahan tidak dapat dipisahkan oleh sumber daya manusia sebagai aktor atau pelaku penting dalam menjalankan roda organisasi. Karenanya, sumber daya manusia sebagai basis penting dalam menjalankan roda organisasi harus dapat menjamin kehadiran keterwakilan perempuan terhadap cerminan representasi substantif agar dapat menjadi saluran kepentingan perempuan dalam menyelenggarakan organisasi di desa.

Mengingat pemerintah dengan masyarakat merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan, sebagai satu kesatuan dari bagian atas keseluruhan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Koiman dalam (Harbani, 2017:250) menegaskan bahwa serangkaian hubungan akan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu, relasi antara pemerintah, baik dengan masyarakat maupun dengan antar kelembagaan di desa harus memiliki hubungan timbal balik yang proporsional, agar secara representasi dalam kaitannya peran dan tugas laki-laki dan perempuan terhadap perspektif gender dapat mencerminkan keadilan dan sama-sama memiliki tanggungjawab terhadap kewajiban menjalankan roda organisasi atau kelembagaan di desa/kalurahan.

Kehadiran program dari Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang mana diwakili oleh pengurus dan anggota Desa Prima. Desa Prima di Kalurahan Sriharjo sejak tahun 2009 telah menarik partisipasi masyarakat terlibat sebagai anggota. Namun, jumlah keterlibatan yang banyak justru membuat mereka kurang bertanggungjawab terhadap masing-masing bidang menyebabkan seolah berjalan pincang. Sebuah organisasi ketika terdapat suatu persoalan yang dibiarkan terus menerus mengakibatkan organisasi menjadi tidak maksimal. Organisasi yang hanya sekadar prosedural di mana terdapat pertemuan, SK

(Surat Keputusan) Kepengurusan yang hanya formalitas menjadikan organisasi tersebut secara substantif tidak maksimal.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu wadah dalam mendukung arah pembangunan Kalurahan Sriharjo salah satunya dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, anak, dan difabel di Kalurahan Sriharjo. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bersama dengan PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang seharusnya menjadi forum penghapusan KDRT belum bekerja secara maksimal.

Kehadiran perempuan dalam kelembagaan Kalurahan yang diwakili oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan Pengurus dan anggota Desa Prima diharapkan mampu menjadi saluran kepentingan-kepentingan perempuan. Namun, apakah kehadiran perempuan dalam kelembagaan tersebut hanyalah sekadar birokratisasi tetapi tidak memperkuat keberadaan perempuan. Dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan terdapat anggota yang berasal dari keterwakilan perempuan. Akan tetapi, apakah keterwakilan perempuan tersebut telah mampu menjadi saluran kepentingan perempuan, atau hanya sekadar memenuhi terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Penelitian ini akan meneliti representasi perempuan dalam kelembagaan Kalurahan yang diwakili oleh Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan program Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa /Kalurahan Mandiri Budaya yang mana diwakili oleh pengurus dan anggota Desa Prima sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan ekonomi dan kemandirian perempuan. Penulis menggunakan perspektif *governance*, bagaimana memahami partisipasi, tentang kekuasaan itu tidak mengumpul. Apakah hadirnya perempuan dalam kelembagaan di atas justru memperkuat tentang kemandirian desa atau menggerogoti kemandirian desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana representasi perempuan dalam kelembagaan Kalurahan?”

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian representasi perempuan dalam kelembagaan kalurahan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

1. Representasi formal dalam kelembagaan Kalurahan.
2. Representasi Substantif dalam kelembagaan Kalurahan.
3. Representasi Deskriptif dalam kelembagaan Kalurahan.
4. Representasi Simbolik dalam Kelembagaan Kalurahan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan representasi perempuan dalam kelembagaan kalurahan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat berguna untuk menjadi referensi pegiat isu representasi, pegiat desa, dan peneliti lainnya terhadap pembahasan mengenai representasi perempuan dalam kelembagaan kalurahan serta dapat memperkaya keilmuan di bidang disiplin ilmu pemerintahan.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ide atau gagasan bagi Kalurahan Sriharjo tentang representasi perempuan dalam kelembagaan kalurahan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Literatur Review

Beberapa penelitian terdahulu mengenai representasi dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

Representasi Perempuan

- a) Kepala Desa perempuan sudah seharusnya merepresentasikan kepentingan-kepentingan perempuan. Di Desa Dersansari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang,

selama 50 tahun dipimpin kepala desa laki-laki. Kehadiran kepala desa perempuan diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi justru belum menjadi kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Selain itu, tingkat partisipasi perempuan masih minim. Dari penelitian di atas dapat diketahui bahwa keberadaan perempuan masih sebagai simbol (Valiant & Ambar, 2019).

- b) Menurut Hanna F. Pitkin (1976) mengelompokkan representasi ke dalam 4 (empat) konsep. Pertama, Representasi formal, sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal seperti parlemen. Kedua, Representasi substantif, dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk mereka yang diwakili. Ketiga, Representasi deskriptif, dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk orang-orang yang secara objektif serupa. Keempat, Representasi simbolik, jika wakil berdiri untuk mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik.
- c) Pemikiran JJ Rousseau tentang kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan. Dalam arti tertentu, orang mendelegasikan kekuasaan kepada pemimpin. Rakyat masih

memegang kendali dan tidak akan menyerahkan kekuasaan itu. Karena rakyat memberikan kekuasaan, pemimpin harus mewakili kehendak rakyat. Salah satunya adalah kebijakan yang diterapkan harus benar-benar positif bagi rakyat.

- d) Berbicara tentang politik desa pasti berpengaruh pada pembangunan desa. Pembangunan desa di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul didominasi laki-laki. Akses terbuka tanpa sosialisasi membuat perempuan merasa seperti patung di forum, atau hanya diperkenalkan untuk memenuhi kuota kehadiran perempuan di majelis desa. Rendahnya partisipasi perempuan terlihat dari banyaknya organisasi perempuan yang terlibat dalam perundingan tidak terwakili. Terbukti bahwa suara perempuan di Desa Pacarejo tidak terkoreksi secara maksimal (George, 2020).
- e) Pada masa kepala desa Sinar Wajo laki-laki, posisi perempuan diabaikan bahkan perbedaan gender terus melebar. Kehadiran kepala desa di desa Sinar Wajo membawa perubahan. Perubahan ini terlihat dari langkah-langkah positif yang diambil oleh kepala desa yang berkomitmen terhadap partisipasi dan hak-hak perempuan. Dengan kata lain: kepala desa sudah mewakili perempuan secara substantif (Nurhadijah & Ulya dkk, 2018).

- f) Partisipasi perempuan dalam politik dapat dilihat berdasarkan dua indikator. Pertama, partisipasi di parlemen. Kedua, partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan baik dalam lembaga administrasi maupun struktur administrasi. Partisipasi perempuan dalam politik dan pemahaman yang tepat tentu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi perempuan (Fransin, 2017).
- g) Kepemimpinan wanita adalah urutan hari ini di Riau. Keikutsertaan perempuan dalam posisi kepemimpinan, mulai dari pengurus RT, diterima baik dengan masyarakat karena memungkinkan aspirasi perempuan tersalurkan ke berbagai daerah (Hanani, 2017).

Penelitian-penelitian di atas lebih banyak memfokuskan pada persoalan representasi yang tidak substantif sehingga berdampak pada tidak terakomodirnya suara perempuan. Penelitian di atas belum melihat representasi dalam kelembagaan formal menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan program dari Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 yang akan diwakili oleh pengurus dan anggota Desa Prima. Kemudian penulis mendudukan representasi dalam konteks kelembagaan kalurahan.

G. Kerangka Konseptual

1. Representasi

Pada studi ini konsep representasi dimaknai sebagai representasi perempuan dalam kelembagaan kalurahan yang diwakili oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan program dari Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Mandiri Budaya yang mana diwakili oleh pengurus dan anggota Desa Prima. Pada dasarnya bergerak sebagai organisasi yang terdapat representasi perempuan, sebagai representasi dari perempuan sudah seharusnya dalam perjalanannya harus menyuarakan kepentingan perempuan. Kelembagaan tersebut berjalan dalam kerangka representasi perempuan di desa yang telah diatur dalam regulasi. Representasi secara umum dikenal sebagai menghadirkan, dalam artian ketika sebuah organisasi terdapat representasi perempuan berarti dapat menghadirkan perempuan.

Secara sederhana representasi diartikan sebagai keterwakilan, ketika berbicara terkait keterwakilan gender (perempuan) dalam parlemen contohnya, hal tersebut sejalan dengan penetapan kuota 30% pada kepengurusan partai politik yang dinilai hanya formalitas. Representasi hanya dilihat sebatas dalam pemilihan, sehingga studi mengenai representasi hanya sebatas representasi anggota parlemen atau hubungan antara wakil dan yang diwakili. Padahal, representasi merupakan sebuah

konsep kunci demokrasi khususnya dalam demokrasi perwakilan (Sutoro Eko, 2013: 9).

Seperti Muhamad Hidayanto dan Yonatan H. Lopo, dalam studinya membicarakan representasi terwujud dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui ruang partisipasi terbuka yang memberikan kesempatan sama. Saat seseorang mewakili, sejatinya ia sekadar berbicara untuk (*speaking for*) kelompok atau orang yang diwakili dan berbicara tentang (*speaking about*) masalah tertentu. Menurut Anne Phillips dalam memaknai representasi atau keterwakilan politik saat ini berangkat dari bentuk politik ide, keberadaan wakil politik membawa berbagai ide atau gagasan dari orang-orang yang diwakilinya.

Representasi di atas lebih banyak dimaknai sebagai keterwakilan politik. Namun, di sisi lain merujuk pada Hanna F. Pitkin (1976), *The Concept Of Representation*, menunjukkan bahwa konsep representasi berasal dari bahasa latin, *repraesentare*, yang berarti menjamin seseorang hadir secara literal, fisik, dan langsung. Makna literal dikembangkan menjadi nonliteral, representasi ditunjukkan dengan kehadiran nonfisik, dimana orang-orang yang diwakili (*represented*) hadir diwakili orang-orang yang mewakili (*representatives*). Kehadiran yang diwakili itu hadir secara artifisial dengan tindakan representasi yang dijalankan oleh yang mewakili (Abdur Rozaki dkk, 2014: 20).

Representasi oleh Hanna F. Pitkin (1976), membuat dua kategori yang menjadi pijakan dalam memahami model representasinya. Pertama *stand for* (berdiri sendiri), yaitu sebuah pola relasi yang terbangun karena pihak yang terbebani tanggung jawab. Kedua adalah *act for* (beraksi menggantikan) yaitu relasi yang terbangun karena ada pihak yang diberikan tanggung jawab. Kategori *stand for* terdiri dari representasi deskriptif dan representasi simbolik sedangkan kategori *act for* terdiri dari representasi formal dan representasi substantif. Pitkin kemudian menjabarkan keempat konsep representasi sebagai berikut:

- a. Representasi Formal (*formalistic representation*), Representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal (seperti parlemen). Representasi dilihat sebagai pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Wakil memiliki hak untuk bertindak, sesuatu yang tidak dimiliki sebelumnya. Sebaliknya, wakil yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Representasi formal dipahami sebagai representasi politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal. Sebagai contoh kepala negara mewakili rakyatnya dalam forum internasional.
- b. Representasi Substantif (*substantive representation*), Representasi substantif dipahami sebagai model representasi di mana seorang

wakil bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakili. Representasi dalam konteks ini menyebutkan ketika representator membawa kepentingan ide-ide yang terepresentasi ke dalam area kebijakan publik. Representasi substantif merupakan bentuk representasi yang selalu mencari “isi” (*substance*) dari sebuah keterwakilan yang ada. Model ini memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama sehingga tercapai semua kepentingan dari segala pihak. Konsep ini memandang representatif bukan sekadar sebagai cara berdiri seseorang demi orang lain (*a way of standing for someone*) tetapi sebagai cara bertindak untuk demi orang lain (*a way of acting for someone*). Representasi substantif selalu mencari substansi dari sebuah keterwakilan yang ada dan memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama, sehingga tercapai semua kepentingan dari segala aspek.

- c. Representasi Deskriptif (*descriptive representation*), Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (*stands for*) orang-orang yang secara objektif serupa. Seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai *standing for* segala sesuatu yang tidak ada. Wakil bisa berdiri demi orang yang diwakili atau cukup menyerupai orang lain.
- d. Representasi Simbolik (*symbolic representation*), jika wakil berdiri untuk (*stands for*) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi

simbolik. Representasi simbolik berarti mempresentasikan sesuatu yang tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan simbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Meskipun sebuah simbol merepresentasikan “*standing for*” segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Model seperti ini merupakan bentuk representasi berdasarkan relasi simbolik yang ada di sosial kultural masyarakat dan adanya simbol tertentu yang menjadi sistem kepercayaan dan hadir dalam kehidupan masyarakat menjadi keseharian.

Kehadiran perempuan secara kelembagaan mewakili perempuan sehingga dalam menjalankan organisasi berpihak kepada kepentingan perempuan. Lembaga kalurahan yang diwakili oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan program Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Mandiri Budaya yang mana diwakili oleh pengurus dan Desa Prima memiliki relasi langsung dengan masyarakat. Pertama, dalam representasi formal terdapat dua aspek, yaitu otorisasi yang merupakan proses seseorang untuk mendapatkan otoritas misalnya dalam Pemilu dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas otoritas tersebut. Penulis akan melihat aspek tersebut dalam kelembagaan sekaligus melihat keberadaan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan. Kedua, representasi substantif penulis akan melihat apakah kehadiran perempuan dalam kelembagaan kalurahan yang diwakili oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,

Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan pengurus dan anggota Desa Prima berpihak kepada kepentingan perempuan yang dilihat dari program dan kegiatan. Ketiga, dalam representasi deskriptif dilihat dari latar belakang keterlibatan dalam kelembagaan. Terakhir, dalam Keempat, dalam representasi simbolik melihat tujuan keterlibatan dalam sebuah organisasi.

2. Kelembagaan Desa/Kalurahan

Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) memahami kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif. Elemen ini memberikan pengaruh terhadap kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam memberikan stabilitas dan makna, lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti *rules, norms, cultural benefit*, peran dan sumber daya material. Hal tersebut dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.

Kelembagaan menurut Norman Uphoff (1986) mendefinisikan Kelembagaan adalah sebagai himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Istilah kelembagaan memberi tekanan pada lima hal, di antaranya; pertama, Pertama, kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Kedua, kelembagaan berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan

perilaku. Ketiga, kelembagaan berkaitan dengan perilaku, seperangkat tata kelakuan atau cara bertindak yang berjalan di masyarakat. Keempat, Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi. Kelima, kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah.

Pasca lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, telah diatur mengenai Kelembagaan Desa/Kalurahan yang terdiri dari Lembaga Pemerintahan Desa/Kalurahan yang terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga adat. Desa/Kalurahan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hadirnya Lembaga Masyarakat desa tersebut digunakan sebagai wadah partisipasi masyarakat. Desa/Kalurahan memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan.

Berdasarkan uraian dari konsep kelembagaan di atas, penulis memilih konsep kelembagaan dengan maksud untuk mengkaitkannya dengan kelembagaan dalam skala lokal Desa/Kalurahan.

3. Gender

Gender seringkali disamakan dengan jenis kelamin. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis. Sedangkan gender secara sederhana dimaknai sebagai konstruksi sosial yang ada di masyarakat. perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak dan fungsi yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan (Suharti, 1995). Gender dapat dikatakan sebagai sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Sebagai contoh, perempuan dikenal lemah-lembut, emosional, sedangkan laki-laki lebih rasional dan perkasa.

Berbicara mengenai gender seringkali tidak terlepas dari isu ketimpangan gender yang ada di masyarakat. Seringkali dalam masyarakat perempuan dikonstruksi terlahir sebagai anak yang anggun dan memiliki peran dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki terlahir sebagai anak yang kuat dan memiliki peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Namun, berjalannya waktu berubah dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Pembagian peran tidak hanya dilakukan sesuai dengan

kodrat, melainkan dapat dipertukarkan sehingga tidak ada diskriminasi terhadap perempuan.

Merujuk pada Julia Cleves Mosse dalam bukunya yang berjudul *Gender dan Pembangunan* berpendapat bahwa gender adalah seperangkat peran seperti kostum dan topeng di teater, menyampaikan pada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga. Gender menentukan akses terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang diperlukan untuk industri dan keterampilan. Adanya ketimpangan gender dalam masyarakat menentukan akses perempuan maupun laki-laki dalam menjalankan kehidupan.

Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati. Oleh karena itu, pembagian peranan antara pria dengan wanita dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan. Peran gender juga dapat berubah dari masa ke masa, karena pengaruh kemajuan: pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Hal itu berarti, peran gender dapat ditukarkan antara pria dengan wanita (Agung Aryani, 2003). Persoalan gender penting untuk dipahami untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa Gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang berada dalam masyarakat. Gender

dan jenis kelamin adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan. Gender di sini sangat penting untuk dipahami dalam melihat persoalan perempuan. Kesalahpahaman antara pengertian gender dan jenis kelamin terkadang membuat permasalahan baru yang merugikan perempuan.

Persoalan perempuan yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender memunculkan sebuah Gerakan feminisme. Feminisme merupakan sebuah Gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Feminisme juga dikenal dengan emansipasi, yang menyuarkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Feminisme liberal membuat suatu kesadaran masyarakat perempuan untuk menggali potensi yang dimiliki dalam semua bidang. Dengan demikian, perempuan tidak terkurung sehingga dapat aktif dalam ranah publik. Menurut Alison Jaggar dalam bukunya *Feminist Politics and Human Nature*, dalam pemikiran kaum liberal sifat unik yang dimiliki manusia adalah rasionalitasnya.

Feminisme marxis, memandang bahwa penindasan terhadap kaum perempuan merupakan bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi, sekaligus menganalisis cara perempuan dan gender dieksploitasi, didiskriminasi, melalui kapitalisme (Arwan, Mahyuni, dan Nuriadi, 2019). Feminisme radikal membongkar patriarki daripada menyesuaikan sistem melalui perubahan hukum, sekaligus menolak pengurangan penindasan terhadap persoalan kelas.

Di Indonesia sendiri, Gerakan feminisme atau dikenal dengan emansipasi Wanita muncul pada masa R.A. Kartini seorang emansipator perempuan. Pada saat itu, Kartini meminta kesetaraan hak dalam memperoleh Pendidikan kepada ayahnya. Kartini berusaha meruntuhkan tradisi Jawa seperti pingitan. Feminisme sendiri merupakan sebuah gerakan untuk mengupayakan kesetaraan gender. Dalam studi ini, penulis menggunakan konsep gender yang dimaknai sebagai pembagian peran dalam masyarakat yang dapat dipertukarkan.

4. Governance

Dari sisi pemerintahan *governance* dimaknai sebagai tata pemerintahan, interaksi antara pemerintah dengan aktor lain seperti negara, birokrasi, pasar, dan masyarakat sipil ketika menjalankan fungsi-fungsi governing. Secara sederhana *governance* itu berbicara tentang interaksi atau relasi antara pemerintah dengan yang lain dalam konteks menjalankan fungsi-fungsi governing mengatur dan mengurus. Persoalannya adalah *governance* yang saat ini sangat kental dalam bingkai administrasi publik. Sehingga pemahaman seperti ini mereduksi dimensi politik dari sebuah *governance* lalu mengabaikan politik itu sendiri bekerja dalam relasi atau interaksi pada sebuah perbuatan pemerintah.

Pada konteks *governance*, partisipasi hendak menempatkan masyarakat dalam posisi yang sebenarnya. Pertama, masyarakat bukanlah sebagai hamba (*client*) melainkan sebagai warga (*citizen*). Jika hamba memperlihatkan kepatuhan secara total, kalau konsep warga menganggap

bahwa setiap individu adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak penuh untuk memiliki. Kedua, masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai teman sejajar (*partner*) pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Ketiga, partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. Keempat, masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif menentukan kebijakan (Sutoro Eko, 2004). Partisipasi tidak hanya dipandang sebagai proses melainkan juga tujuan, sehingga muncul pemberdayaan yang menghubungkan partisipasi dengan demokrasi, kewargaan, serta kesetaraan.

Sutoro Eko dalam pengantar buku transformasi ekonomi politik desa mengatakan bahwa pembangunan desa bukan hanya persoalan teknis, ekonomis dan teknokratis, tetapi di dalamnya terjadi proses *governance* atau proses relasi politik antara pusat-daerah-desa serta negara dan masyarakat, sehingga pembangunan membutuhkan sentuhan desentralisasi dan demokratisasi. Jangka panjang dari pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan *human well-being* masyarakat desa: mencapai kesetaraan (gender dan kelas), kesejahteraan masyarakat, keadilan dan kemandirian desa (Sutoro Eko, 2005). Dalam penelitian ini penulis akan melihat proses *governance* dalam konteks pembangunan desa yang berwawasan gender. Penulis sekaligus akan representasi perempuan dalam perspektif *governance* yang berarti relasi dalam kelembagaan menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang diwakili oleh Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan program Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang diwakili pengurus dan anggota Desa Prima.

H. Metodologi Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu cara untuk menjawab dan mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi secara ilmiah. Pada penelitian tentunya menggunakan suatu metode untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian menurut Creswell (1998) adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode penelitian fenomena sosial dan permasalahan manusia, dengan metode ini keadaan objek ilmiah dipelajari, peneliti sebagai alat kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian ini menekankan generalisasi (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kondisi, fenomena, masalah atau peristiwa dengan menggunakan skala nominal atau ordinal sebagai variabelnya.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi atau fenomena yang terjadi sedemikian rupa sehingga memberikan informasi umum tentang pokok penelitian yang sedang dipelajari. Penelitian ini hendak menelaah lebih dalam bagaimana organisasi perempuan di

tingkat padukuhan hingga kalurahan dalam mempersoalkan representasi. Selain itu, dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana representasi perempuan dalam kelembagaan kalurahan menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang diwakili oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan program Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang diwakili pengurus dan anggota Desa sebagai saluran perjuangan bagi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Kalurahan yang responsif gender.

b) Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah representasi perempuan dalam kelembagaan Kalurahan yang diwakili oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan program Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang diwakili pengurus dan Desa Prima di Kalurahan Sriharjo di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Sriharjo, Kelembagaan Kalurahan yang diwakili Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna,

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan pengurus dan anggota Desa Prima. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan cara Teknik purposive yaitu, mengambil data berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti akan menentukan informan yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kalurahan Sriharjo serta praktik demokrasi terhadap pembangunan di Kalurahan Sriharjo. Berikut informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Data Informan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Lurah Kalurahan Sriharjo	1
2.	Pamong Kalurahan	1
3.	Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan	1
4.	Ketua Karang Taruna Kalurahan	1
5.	Ketua Desa Prima	1
6.	Warga Kalurahan Sriharjo	1
7.	Badan Permusyawaratan Kalurahan	1
Total		7

Sumber : Diolah Dari Data Primer Tahun 2023

c) Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.

d) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan secara partisipatif dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan memperhatikan dan berpedoman terhadap tujuan penelitian. Manfaat penelitian dari observasi ini antara lain: (1) Peneliti dapat mengetahui ada/tidaknya kenyataan atau fakta kehidupan yang dicari dalam penelitian ini; (2) Peneliti dapat mengetahui kenyataan atau fakta kehidupan tersebut; (3) Peneliti dapat membuktikan konsep teori yang dibuat.

Pada observasi ini penulis akan mengamati kegiatan sehari-hari orang yang akan diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2016: 64). Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan informan. Pada bagian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara maupun tanpa menggunakan pedoman wawancara. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Lurah Pemerintah Kalurahan Sriharjo, Ketua Tim Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga, Ketua Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Ketua Desa Prima, dan Masyarakat Kalurahan Sriharjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tertulis atau dokumen maupun rekaman yang ada di daerah penelitian dan langkah ini dilakukan agar hasil wawancara terdokumentasikan dengan baik. Adapun dokumen yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Desa, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Peraturan Kalurahan Sriharjo, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo, Buku Monografi Desa Sriharjo Semester II Tahun 2020, buku-buku, skripsi, artikel yang berkaitan dengan penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun informasi secara sistematis yang diperoleh melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, survei, observasi dan dokumentasi, seperti merekam video/audio, mengatur informasi dan memilih poin-poin penting dan dipelajari serta kesimpulan. Data yang dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam format laporan dan dianalisis. Analisis data ini dilakukan dengan mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi Data, yaitu pemilihan informasi dasar menurut peneliti atau tulisan.
- b. Penyajian Data (*data display*) merupakan penyajian data atau informasi yang sudah direduksi dan bersifat naratif untuk memudahkan pemahaman tentang peristiwa, merencanakan pekerjaan berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.
- c. Pengambilan keputusan dan verifikasi, yaitu penulis mencoba memahami informasi yang diberikan kepadanya. Keabsahan data yang dianalisis dilakukan dengan triangulasi, yaitu dengan mengecek keabsahan data terhadap data (Moeloeng 1999, dalam Sugiyanto, 2010:6). Menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan dan memeriksa tingkat pengetahuan dengan membandingkan informasi dari wawancara terbuka terstruktur dengan hasil data observasi.

BAB II

PROFIL KALURAHAN SRIHARJO

A. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Sriharjo merupakan salah satu Kalurahan di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kapanewon Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berdiri sejak tahun 1946. Pemberian nama “Sriharjo” berawal dari mitos jawa, kata ‘Sriharjo’ adalah pemberian dari Dewi Sri dan ‘harjo’ yaitu raharjo atau sejahtera. Makna dari nama tersebut adalah sebuah desa yang sejahtera dengan mata pencaharian pokok warganya adalah bercocok tanam. Kalurahan Sriharjo memiliki luas wilayah 585,91 Ha, di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kalurahan Kebonagung dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Selopamioro. Wilayah Sriharjo terletak di antara dua sungai yaitu Sungai Oya dan Sungai Opak yang merupakan batas alam desa. Sungai tersebut menjadi sumber utama dalam pengairan pertanian yang ada di Kalurahan Sriharjo.

Pada awalnya Kalurahan Sriharjo merupakan penggabungan dari tiga kalurahan yaitu Kalurahan Mojohuro, Kalurahan Dogongan, dan Kalurahan Kedungmiri. Setelah terjadi penggabungan tiga kalurahan, pada sementara waktu kantor berada di rumah Bapak Sosro Margono yang terletak di Padukuhan Mojohuro. Beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 1951 tanah kas desa di wilayah Padukuhan Mojohuro dibangun kantor yang baru. Kalurahan Sriharjo pada waktu itu terbagi menjadi 13 (tiga belas) padukuhan meliputi Padukuhan Miri, Jati, Mojohuro, Pelemadu, Sungapan,

Gondosuli, Trukan, Dogongan, Ketos, Ngrancah, Pengkol, Sompok, dan Wunut. Dahulu masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar belum mengenal Kalurahan Sriharjo. Berjalannya waktu, Kalurahan Sriharjo dikenal dengan destinasi wisata yang dikembangkan. Beberapa destinasi wisata yang menjadi pusat perhatian masyarakat adalah aliran sungai yang menawan sekaligus area terasering yang menjulang tinggi.

B. Hubungan Sosial Ekonomi Kalurahan

Daerah Istimewa Yogyakarta selain menjadi kota pelajar juga dikenal dengan pariwisata. Destinasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta terbentang di setiap kabupaten/kota. Sebagai daerah pariwisata, tentu roda perputaran ekonomi juga tinggi. Kabupaten Bantul menjadi salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. salah satu kalurahan di Kabupaten yang pernah mengalami tingkat kemiskinan ekstrim adalah Kalurahan Sriharjo tepatnya di Padukuhan Miri yang terletak di Kapanewon Imogiri.

Berbicara mengenai kemiskinan, Kalurahan Sriharjo masih tergolong tinggi. kondisi tersebut mempengaruhi arah kebijakan Kalurahan Sriharjo untuk berfokus pada pengentasan kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. selain itu, dalam menanggulangi kemiskinan, perlu skema optimalisasi partisipasi masyarakat. Pada kepemimpinan lurah saat ini, beberapa upaya telah dilakukan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri pada masa pandemi Covid-19 seluruh masyarakat di Indonesia terdampak pada perekonomian termasuk masyarakat di Kalurahan Sriharjo. Namun, justru pada akhir pandemi salah satu destinasi wisata yang ada di Sriharjo yaitu Srikeminut dibanjiri wisatawan. Kehadiran wisatawan tersebut untuk menikmati pesona alam sekaligus olahraga sepeda. Di Kawasan wisata tersebut terlihat banyak para pedagang menjual berbagai makanan dan minuman. Menariknya, pedagang di wilayah tersebut hanya berasal dari masyarakat asli Sriharjo, sehingga perekonomian mereka mampu stabil.

Perempuan di Kalurahan Sriharjo pada masa pandemi Covid-19 lebih mampu bertahan hidup. Dari sisi perekonomian UMKM perempuan memiliki peranan yang cukup penting. Banyak perempuan di Kalurahan sriharjo yang memiliki inisiatif untuk membuka usaha, seperti menjual sayur secara online. Tingkat ketahanan pada masa pandemi lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki sehingga perempuan banyak mengambil peluang seperti berjualan wedang uwuh dan kuliner makananan. Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa perempuan memiliki potensi dan daya tahan yang tinggi.

C. Organisasi Kelembagaan

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan pemberdayaan perempuan. Sering kita menjumpai istilah PKK di Desa dengan sebutan

Ibu-Ibu PKK karena memang mayoritas anggota PKK adalah perempuan. PKK di Kalurahan Sriharjo sangat mendukung Pembangunan Desa Sriharjo. Kegiatan PKK antara lain kegiatan P2WKS, Desa Prima, DBKS, B3A, Kesehatan, Posyandu Lansia, Posyandu Balita, Penanggulangan DB4MK, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta di bidang Pendidikan yaitu PAUD, TK, dan TPA. Organisasi ini menjadi salah satu organisasi yang paling dekat dengan lingkungan keluarga, sehingga diharapkan organisasi ini mampu menjadi wadah masyarakat terutama perempuan dalam pemberdayaan sekaligus penyelesaian persoalan dalam tataran keluarga.

2. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat terutama kalangan pemuda. Sebagai organisasi kepemudaan Karang Taruna berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa. Pemuda desa terutama di masyarakat Jawa seringkali tidak diperhitungkan dalam hal suara mereka. Selain itu, pemuda terkhusus perempuan seringkali tidak dianggap atau hanya dihadirkan sebagai pelengkap. Oleh karena itu, kehadiran Karang Taruna sebagai wadah partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengakomodir kepentingan pemuda. Karang Taruna Kalurahan Sriharjo Bernama Karang Taruna Sedyo Bakti yang bersekretariat di Kantor Kalurahan Sriharjo. Banyak kegiatan telah dilakukan oleh Karang

Taruna dari segi kesenian, budaya, dan agama. Keberadaan pemuda di Kalurahan Sriharjo dapat dikatakan sangat aktif. Potensi pemuda yang ada di Sriharjo begitu banyak, salah satunya dalam mendesain gambar. Menariknya, desain logo untuk area terasering di wilayah wisata Srikeminut merupakan karya pemuda Kalurahan Sriharjo.

3. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)

Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan badan permusyawaratan di tingkat kalurahan yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. BPKal bersama Pemerintah Kalurahan Sriharjo memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan bertujuan untuk peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat kalurahan, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Anggota BPKal di Kalurahan Sriharjo berjumlah 7 (tujuh) orang di antaranya dua orang perempuan terdiri dari satu orang keterwakilan wilayah dan satu orang keterwakilan perempuan. Susunan personalia Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo di meliputi ketua bernama Jumanto, wakil ketua bernama Tutik Nuryati, Sekretaris bernama Resmi Asih, Anggota bernama Eko Priyono, A.Ma, Ari Sumaryanto, Sariyanto, dan Agus Sabar Narimanto. Jika ditinjau dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo, keterwakilan perempuan baik keterwakilan wilayah maupun keterwakilan perempuan terhadap Badan Permusyawaratan

Kalurahan Sriharjo belum mencerminkan representasi secara proporsional, dimana jumlah laki-laki masih mendominasi dari seluruh jumlah anggota BPKal Sriharjo yaitu sebesar 71,40% atau berjumlah 5 (lima) orang anggota laki-laki dibanding persentasi terhadap jumlah anggota perempuan yang hanya berjumlah 2 (dua) orang anggota atau sebesar 28,60%.

Tabel 2. 1 Data Personalia Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo

No	Nama	Dapil	TMT Masa Jabatan
1.	Ari Sumaryanto	Padukuhan Miri dan Jati	01 Januari 2018
2.	Tutik Nuryati	Keterwakilan Perempuan	01 Januari 2018
3.	Sariyanto	Padukuhan Sompok dan Wunut	01 Januari 2018
4.	Eko Priyono, A.Ma	Padukuhan Ketos, Ngrancah, dan Pengkol	01 Januari 2018
5.	Resmi Asih	Padukuhan Dogongan dan Trukan	01 Januari 2018
6.	Jumanto	Padukuhan Mojohuro dan Gondosuli	01 Januari 2018
7.	Agus Sabar Narimanto	Padukuhan Sungapan dan pelemadu	01 Januari 2018

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2020

4. Desa Prima

Desa Prima adalah desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga

sejahtera. Desa Prima merupakan program dari Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa Prima di Kalurahan Sriharjo dinamakan Desa Prima “Sejahtera” yang memiliki jumlah anggota 26 (dua puluh enam) orang yang aktif serta anggota yang macet berjumlah 41 (empat puluh satu) orang. Program kegiatan yang dilaksanakan saat ini adalah koperasi simpan pinjam.

D. Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan merupakan Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Sriharjo. Lurah bertugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Tabel 2. 2 Data Personalia Pemerintah Kalurahan Sriharjo

No	Nama	Jabatan	TMT Masa Jabatan
1.	Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P	Lurah	22 November 2018
2.	Kuswoyo	Carik	24 Juli 2018
3.	Sandung	Jagabaya	21 Januari 1998
4.	Wahyudi	Kaur Tata Laksana	08 Maret 2003
5.	Ismiyati	Kaur Danarta	24 Juli 2018
6.	Gotro Raharjo, S.Si	Ulu-Ulu	24 Juli 2018
7.	Drs. H As'ari	Kamituwa	22 November 1990
8.	Sudarsono	Kaur Pangripta	08 Agustus 2002
9.	Muryadi	Dukuh Gondosuli	31 Maret 2008
10.	Warsono	Dukuh Sungapan	08 Agustus 2002
11.	Samsuri	Dukuh Ketos	21 November 2011
12.	Sugiyanto	Dukuh Wunut	08 Agustus 2022
13.	Triyono	Dukuh Sompok	07 Oktober 2019
14.	Ari Usman, SE	Dukuh Pengkol	07 Oktober 2019
15.	Jumad	Dukuh Ngrancah	24 Juli 2018
16.	Andri Priyanto	Dukuh Trukan	24 Juli 2018
17.	Budi Saryanto	Dukuh Dogongan	24 Juli 2018
18.	Sumarji	Dukuh Pelemadu	31 Maret 2008
19.	Basharudin	Dukuh Miri	08 Januari 2003
20.	Sulistyo Prihatmadi	Dukuh Mojohuro	08 Agustus 2002
21.	Bambang Rinadi	Dukuh Jati	08 Agustus 2012
22.	Sismanto Purnomo	Staf	01 Januari 2020
23.	Ikhwan Dwi Ashari	Tenaga Honorer	01 Januari 2018
24.	Nur Hidayat, S.Pd.I	Tenaga Honorer	01 Januari 2018
25.	Muhammad Nur Kholis	Tenaga Honorer	01 Januari 2018
26.	Tiwik Lisnawati	Tenaga Honorer	01 Agustus 1018

Sumber: Data Monografi Desa tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan masa jabatan awal dalam menduduki pemerintahan Kalurahan Sriharjo. Pada pemerintah Kalurahan Sriharjo pamong kalurahan yang menduduki jabatan lebih awal adalah kamituwo pada tahun 1990. Sedangkan, lurah sebagai orang nomor 1 (satu) dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Sriharjo menduduki jabatan pada tahun 2018. Perbedaan tersebut tentu menjadi tantangan sendiri bagi lurah untuk dapat mengakomodir seluruh Pamong Kalurahan Sriharjo.

E. Kondisi Demografis

Berdasarkan data pada tahun 2020, penduduk di Kalurahan Sriharjo berjumlah 9.489 jiwa atau 3.342 kepala keluarga yang terdiri dari 4.687 penduduk penduduk laki-laki dan 4.826 penduduk perempuan. Menurut standar data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kalurahan Sriharjo berjumlah 3.954 jiwa atau 1.299 kartu keluarga.

a. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Salah satu tingkat perekonomian masyarakat dapat dilihat dari jenis mata pencaharian, meskipun tidak bisa dijadikan tolak ukur mutlak dalam melihat perekonomian masyarakat. Berikut merupakan klasifikasi mata pencaharian di Kalurahan Sriharjo:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	145
2.	TNI/Polri	32
3.	Swasta	628
4.	Wiraswasta/Pedagang	834
5.	Petani	821
6.	Jasa	291
7.	Buruh Tani	278
8.	Pensiunan	74
9.	Peternak	280
10.	Pengrajin	38
11.	Tukang	353
12.	Pekerja Seni	10
13.	Lain-lain	1.041
14.	Tidak Bekerja/Penganggur	619
Jumlah		5.444

Sumber: Data Monografi Desa tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian di Kalurahan Sriharjo adalah wiraswasta/pedagang dengan jumlah 834. Posisi kedua mata pencaharian masyarakat adalah petani dengan jumlah 821 sesuai dengan makna dari nama Sriharjo yang berarti sebuah desa yang sejahtera dengan mata pencaharian pokok warganya adalah bercocok tanam.

b. Jumlah penduduk menurut pendidikan

Pendidikan tidak hanya dilakukan pada tataran keluarga, melainkan perlu menempuh pendidikan formal/umum. Pendidikan

menjadi salah satu bekal dalam menjalani kehidupan. Tingkat pendidikan juga dapat menentukan jenis mata pencaharian masyarakat, semakin tinggi pendidikan maka pekerjaan yang diperoleh semakin baik. Pendidikan akan mempengaruhi bagaimana pola pikir masyarakat dalam menjalin relasi antar masyarakat yang lainnya. Berikut merupakan klasifikasi tingkat pendidikan yang terdapat di Kalurahan Sriharjo:

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	462
2.	Sekolah Dasar/Sederajat	2.680
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.416
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Umum (SMU)	3.217
5.	Akademi/ D1-D3	169
6.	Sarjana	359
7.	Pascasarjana	S2 : 9 orang dan S3: 1 orang
8.	Tidak Sekolah	1.492
9.	Tidak Lulus	1.528
Jumlah		11.333

Sumber: Data Monografi Desa tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Sriharjo memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Umum (SMU) yang berjumlah 3.217 orang.

Sedangkan, jumlah penduduk yang menempuh pendidikan Pascasarjana adalah 10 orang dengan rincian 9 orang S1 dan 1 orang S3. Mayoritas masyarakat yang menempuh pendidikan SMA/SMU menunjukkan bahwa masyarakat di Sriharjo sudah memiliki kemampuan berpikir yang baik, Kemampuan tersebut tentu akan berpengaruh.

F. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo Tahun 2023

Pembangunan Kalurahan Sriharjo pada tahun 2023 diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Program dan Kegiatan Pembangunan Kalurahan Sriharjo Tahun 2023 meliputi 5 (lima) bidang, salah satunya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan terdapat sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang terdapat beberapa kegiatan di antaranya penyelenggaraan musyawarah perencanaan kalurahan, penyelenggaraan musyawarah padukuhan, penyusunan dokumen perencanaan kalurahan, serta penyusunan kebijakan kalurahan.

G. Rencana Kerja Program Keistimewaan

Program dari Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri budaya di mana diwakili oleh Pengurus dan anggota Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) dilaksanakan dalam rangka mendukung program prioritas 3 ENDS (3 Akhiri) yaitu: (1) akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) akhiri perdagangan

manusia, dan (3) akhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Desa Prima berperan dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat Kalurahan melalui upaya ekonomi dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan seluruh potensi, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, pengembangan Desa Prima digunakan untuk peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam suatu wilayah kalurahan.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kualitas tingkat pendidikan, Kesehatan, politik, sosial budaya dan lingkungan hingga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam penentuan usaha. Peningkatan partisipasi perempuan juga perlu dilakukan melalui keikutsertaan perempuan mulai dari perencanaan kegiatan usaha, pengambilan keputusan, dan evaluasi pelaksanaan. Selain itu, peningkatan akses informasi bagi kelompok perempuan agar dapat mengakses sumber daya ekonomi.

Rencana Kerja Desa Prima, disusun setiap tahun oleh Pengurus dan anggota Desa PRIMA, kemudian Rencana kerja disusun dengan cara menjaring aspirasi anggota, setelah itu Rencana kerja yang telah disusun oleh pengurus, disetujui dan disahkan oleh rapat anggota dengan sepengetahuan Pelindung dan Pembina.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Representasi formal dalam kelembagaan kalurahan. Pertama, Pemberdayaan kesejahteraan (PKK) dilihat dari kehadiran wakil Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam musyawarah sebagai wakil dari kelembagaan PKK menunjukkan representasi formal. Kedua, Karang Taruna di Kalurahan Sriharjo telah mendapatkan Surat Keputusan Lurah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna “Sedyo Bhakti” Desa Sriharjo masa bhakti 2019-2022 sehingga pada tahun 2023 sedang mempersiapkan pergantian kepengurusan kembali. Selain itu, amanah yang diberikan oleh ketua kepada wakilnya menunjukkan adanya pemberian kewenangan kepada wakil untuk bertindak, namun dalam pelaksanaannya ketua tetap harus ikut bertanggung. Ketiga, Keberadaan keterwakilan wilayah serta keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila merujuk pada representasi formal terdapat pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Keempat, pada pengurus dan anggota Desa Prima dapat dilihat ketika ketua Desa Prima pada waktu itu diberikan amanah untuk menyelamatkan keberadaan desa prima. Pemberian amanah tersebut sejalan dengan konsep

representasi formal, di mana terdapat pemberian kewenangan untuk dapat bertindak.

2. Representasi substantif dalam kelembagaan kalurahan. Pertama, kehadiran representasi perempuan dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara hakikat telah mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat ketika muncul permasalahan, PKK mampu menindaklanjuti persoalan yang disampaikan oleh warga. Kedua, keterlibatan perempuan dalam Karang Taruna untuk tampil sudah menjadi nilai lebih tersendiri supaya menunjukkan bahwa perempuan mampu tampil di ruang publik. Ketiga, keberadaan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang di dalamnya terdiri dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan telah menunjukkan representasi substantif dilihat dari dampak yang diberikan kepada warga. Keempat, apabila di lihat dari pengurus dan anggota Desa Prima yang tidak aktif sangat tidak sejalan dengan konsep representasi substantif. Kehadiran yang diharapkan mampu bertindak demi orang lain justru sebaliknya yang dilihat dari kepentingan anggota yang tidak aktif hanya untuk sekadar kepentingan pribadi. Namun, Bergesernya waktu, pengurus dan anggota Desa Prima telah menunjukkan representasi yang substantif meskipun masih terdapat pengurus dan anggota yang tidak aktif.
3. Representasi deskriptif dalam kelembagaan kalurahan. Pertama, setiap penanggungjawab Kelompok Kerja di Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) Sriharjo telah memiliki pengalaman di bidangnya. Hal tersebut dikarenakan pada saat pemilihan, mereka dipilih yang memiliki latar belakang banyak berkecimpung dalam masing-masing bidang yang serupa. Hal tersebut telah menunjukkan konsep representasi deskriptif. Kedua, Merujuk pada konsep representasi deskriptif kehadiran perempuan dalam Karang Taruna secara serupa merepresentasikan kalangan pemuda termasuk di dalamnya perempuan. Ketiga, konsep representasi deskriptif dapat dilihat pada pemilihan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan. Dalam hal ini, bukan terletak pada proses pemilihan melainkan pada latar belakang keterlibatan sebagai perwakilan wilayah maupun perempuan. Seorang wakil hadir sebagai keterwakilan yang secara objektif serupa, dalam hal ini hadir sebagai keterwakilan dalam wilayah dan kalangan perempuan. Keempat, berdasarkan representasi deskriptif dapat dilihat ternyata kehadiran perempuan di dalam pengurus dan anggota Desa Prima di mana seorang wakil berdiri untuk (*stands for*) orang-orang yang secara objektif serupa ditunjukkan dari kehadirannya sebagai wakil dari perempuan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian secara ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

4. Representasi simbolik dalam kelembagaan kalurahan. Pertama, Istilah PKK yang seringkali menjadi simbol Ibu-Ibu PKK dalam wilayah Desa/Kalurahan menunjukkan konsep representasi simbolik. Kedua, Kehadiran Karang Taruna di Kalurahan diidentikan sebagai simbol

pemuda. Sehingga apabila merujuk pada konsep representasi Hanna F. Pitkin (1976) masuk ke dalam representasi simbolik. Ketiga, representasi simbolik dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) tercermin dalam keterwakilan perempuan yang mewakili perempuan dan keterwakilan wilayah yang mewakili beberapa wilayah yang ada. Keempat, pengurus dan anggota Desa Prima berasal dari kalangan perempuan yang ingin meningkatkan perekonomian serta kemandirian perempuan. Apabila merujuk pada konsep representasi Hanna F. Pitkin (1976) masuk ke dalam representasi simbolik.

B. Saran

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat:

- Saran untuk Pengurus dan anggota Desa Prima :
 - a) Lebih meningkatkan kebersamaan antara seluruh anggota Desa Prima “Sejahtera” dengan cara pendekatan kultural.
 - b) Memberikan sanksi yang tegas kepada anggota yang tidak aktif terlibat dalam kegiatan Desa Prima. Sanksi tersebut dapat berupa denda maupun dikeluarkan dalam anggota Desa Prima.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Artikel

- Arwan; Mahyuni; Nuriadi (2019). *Perjuangan Perempuan dalam Sarinah karya Soekarno: Kajian Kritik Sastra Feminisme Marxis*. Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia. Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang: Universitas Negeri Medan. 8 (2): 157
- Ari Surida. (2021). *Transformasi Pemimpin ke Pemerintah Desa*
- Fransin Kontu. (2017). *Representasi Perempuan Dalam Politik Lokal di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Unmus Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017, hal 34-46.
- Perempuan Pada Kelembagaan Desa dalam Kebijakan Pembangunan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Desa Rancamaya, Cilogok dan Desa Jumbo Kulon, Sokaraja Kabupaten Banyumas)*. Journal of Politic and Government Studies, Vol 10 No 4.
- Guno Tri Tjahjoko. (2019). *Perempuan Merebut Kekuasaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Sriharjo Kabupaten Bantul Tahun 2018*. Yogyakarta. APMD Press.
- George, Ronaldo Rumaropen (2020). *Representasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa*. Repository Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD.
- Hessels, Jolanda and Terjesen, Siri. (2008). *Resource Dependency and Institutional Theory Perspective on Direct and Indirect Export Choices*. Netherlands and Bloomington. Published online at Springerlink.com.
- Nurha Dijah & Ulya Niemi Efrina Jamson dkk (2018). *Representasi Politik Perempuan: Studi Tentang Kepemimpinan Perempuan Kepala Desa di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi*. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
- Qureta. (2021). *Perempuan dan Pembangunan Desa*. Diakses dari [https://qureta.aisyah/pembangunan desa pada tanggal 18 Mei 2021](https://qureta.aisyah/pembangunan%20desa%20pada%20tanggal%2018%20Mei%202021).
- Riandi T. Astuti dan Yogi P. Pasca. (2015). *Kraton: Menjaga Perempuan, Menjaga Kebudayaan (Studi Kasus Abdi-Dalem Perempuan Kraton Kasunanan Surakarta)*.
- Ratih Probosiwi. (2015). *Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan (Women and Its Role On Social Welfare Development)*. Jurnal Natapraja Volume 3 Nomor 1.
- Silfia Hanani. 2017. *Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik: studi kepemimpinan ketua RT perempuan di desa Dendun Kepulauan Riau*. Jurnal. KAFA'AH Vol.7, No.1. januari-juni. Tahun 2017.

Tim Pusat Studi Wanita Universitas Udayana. 2003. *Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender*. Materi Sosialisasi Gender dan Pengarusutamaan Gender untuk Toga dan Toma di Provinsi Bali. Denpasar. 9 halaman.

Uphoff, Norman T. 1986. *Local Institutional Development, An Analytical Sourcebook with cases . West Hartford Connecticut* : Kumarian Press.

Valiant Dwi Andika & Ambar Widaningrum (2019). *Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Merepresentasikan Kepentingan Perempuan: Studi di Desa Dersansari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.

Buku

Hanna F. Pitkin (1976), *The Concept Of Representation*.

Julia Cleves Mosse. (2018). *Gender dan Pembangunan. Pustaka Pelajar Offset*.

Masri Singarimbun dan D.H Penny. (1976). *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*

Sutoro Eko, Sumarjono, Parwoto, M.Barori, Ade Chandra, Widyo H. Murdianto, Sahrul Aksa. (2005). *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*. APMD Press.

Abdur Rozaki dkk. (2014). *Dari representasi simbolik menuju representasi substantif*. Yogyakarta: Institute For Reseach and Empowerment.

Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry and Reseach Design; Choosing Among Five Traditions*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.

Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Buku Pedoman Desa Prima*.

Data Primer

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemerintahan kalurahan.

Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

LAMPIRAN



Foto wawancara dengan Drs. H. As'ari selaku Kamituwa di Kalurahan Sriharjo. (24 Februari 2023)



Foto wawancara bersama Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P selaku Lurah Sriharjo. (24 Februari 2023)



Foto wawancara bersama Giyatmi selaku Ketua Desa Prima “Sejahtera” di Kalurahan Sriharjo.
(24 Februari 2023)



Foto koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh Desa Prima “Sejahtera” Kalurahan Sriharjo.



Foto wawancara dengan Resmi selaku anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo.

(9 Maret 2023)



Foto wawancara dengan Rokhiyatun Susilowati, SIP selaku ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Sriharjo. (24 Februari 2023)



Foto wawancara dengan Fauzan selaku ketua Karang Taruna Kalurahan Sriharjo. (9 Maret 2023)



Foto wawancara dengan Siti pedagang mie ayam di Kawasan wisata Srikeminut. (10 Maret 2023)

Surat Keputusan Lurah terkait pembentukan pengurus dan anggota Desa Prima

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SIDIHARJO
 NOMOR : 1
 TANGGAL : 10 APRIL 2022

REKAMAN PERSONALIA PENGURUS KECAMPAHAN DESA PRIMA
 "SRIWATI"
 KALurahan SIDIHARJO

No	Zatara Dataran Tim	Nama	Jabatan Desa
1	Pembina I/Pj	Edu Wijayanto K. SLP	Lurah
2	Pembina	Ay Yu	Kanwil
3	Ketua	Gilang	P.K. Dusun
4	Wakil Ketua	Triandah	P.K. Dusun
5	Sekretaris	Syaikh	P.K. Dusun
6	Wakil Sekretaris	Inday I.P. Eko S	P.K. Dusun
7	Bendahara	Sugeng	P.K. Dusun
8	Wakil Bendahara		
9			
10			
11			
12			
13	Sebidan Arban		
14		Bukhari	P.K. Dusun
15		Wardah	P.K. Dusun
16		Servati	P.K. Dusun
17		Tekyana	P.K. Dusun
18		Jandari	P.K. Dusun
19		Ami D.S	P.K. Dusun
20		Hartik	P.K. Dusun

No	Jabatan Dusun Tim	Nama	Jabatan Dusun
21		Siti Alia	P.K. Dusun
22		Eko Rastar	P.K. Dusun
23		Arifah	P.K. Dusun
24		Haris	P.K. Dusun
25		Rizka S	P.K. Dusun
26		Sriwati	

KEBIDAN KALurahan SIDIHARJO

THE ISTIYAWATI K. SIP

REKAMAN PERSONALIA

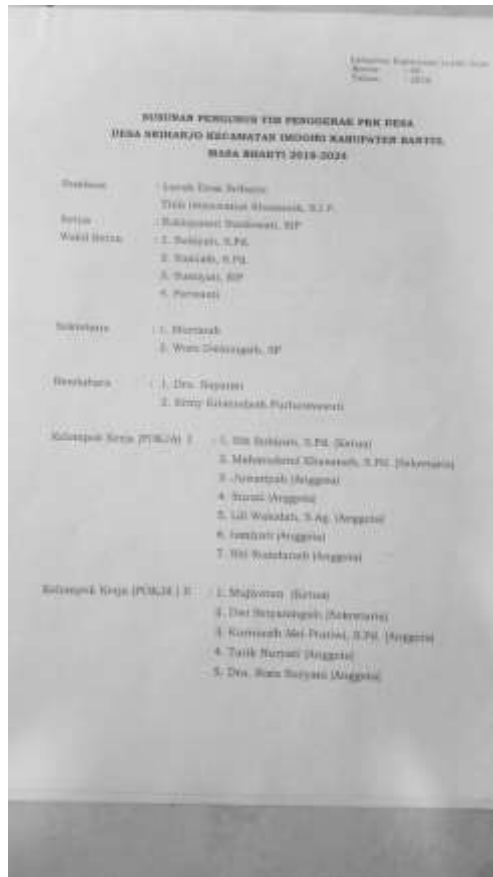
No	Nama	Nama	Jabatan Dusun
1		Indah	P.K. Dusun
2		Sugeng	P.K. Dusun
3		Hidayat	P.K. Dusun
4		Hadi Anas	P.K. Dusun
5		Servati	P.K. Dusun
6		Pj. Asep Triandah	P.K. Dusun
7		Harjo	P.K. Dusun
8		Wardah	P.K. Dusun
9		Si Anas	P.K. Dusun
10		Edu	P.K. Dusun
11		Hartik	P.K. Dusun
12		Hidayat	P.K. Dusun
13		Si Indarwati	P.K. Dusun
14		Yan	P.K. Dusun
15		Di Chari	P.K. Dusun
16		Mardiana	P.K. Dusun
17		Jandari	P.K. Dusun
18		Rizka S	P.K. Dusun
19		Puji	P.K. Dusun
20		Sugeng	P.K. Dusun
21		Rizka S	P.K. Dusun
22		Engah	P.K. Dusun
23		Harjo	P.K. Dusun
24		Sugeng	P.K. Dusun

No	Nama	Nama	Jabatan Dusun
25		Alia	P.K. Dusun
26		Harjo	P.K. Dusun
27		Syaikh	P.K. Dusun
28		Purwaningrum	P.K. Dusun
29		Servati	P.K. Dusun
30		Harjo	P.K. Dusun
31		Wardah	P.K. Dusun
32		Melvia	P.K. Dusun
33		Purwati	P.K. Dusun
34		Sardani	P.K. Dusun
35		Laili	P.K. Dusun
36		Servati	P.K. Dusun
37		Suryani	P.K. Dusun
38		Sardani	P.K. Dusun
39		Nur Kasmah	P.K. Dusun
40		Indi	P.K. Dusun
41		Wardah	P.K. Dusun

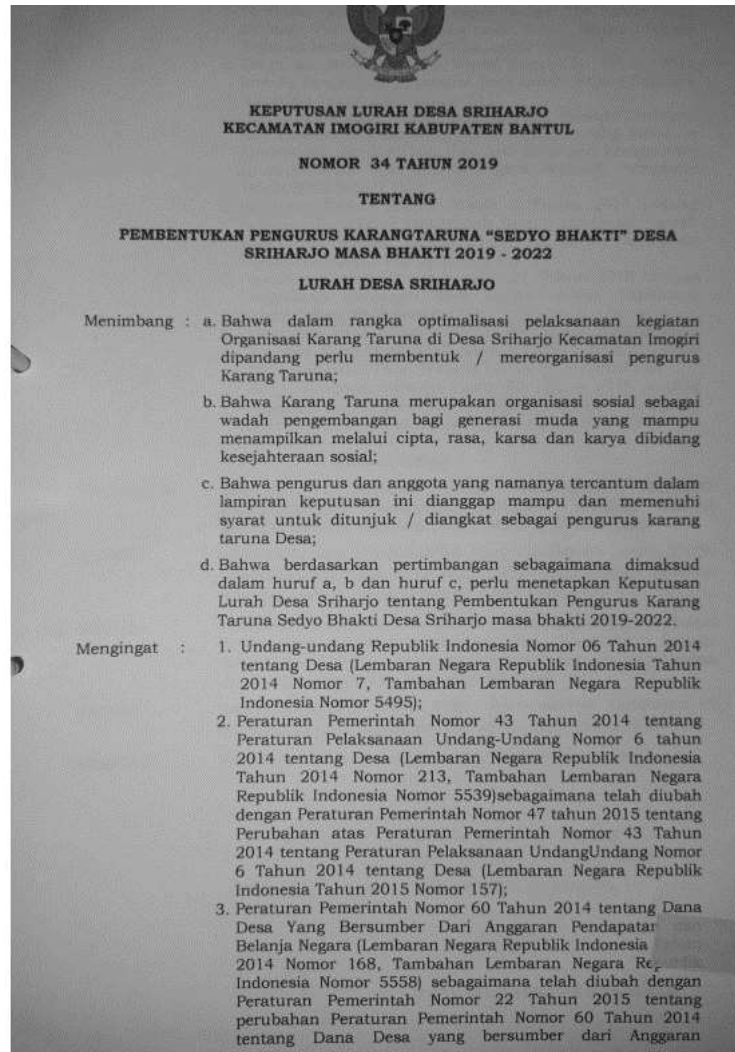
KEBIDAN KALurahan SIDIHARJO

THE ISTIYAWATI K. SIP

Surat Keputusan Lurah terkait susunan Tim Penggerak PKK Sriharjo



Surat Keputusan Lurah terkait pembentukan pengurus Karang Taruna





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 164/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Aisyah Fajar R
No. Mahasiswa	: 19520001
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi	: 7 Oktober 2022
Judul Proposal	: Representasi Perempuan Dalam Pemerintahan Desa (Studi Governing di Kelurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI PEMANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 012/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Aisyah Fajar Rochani
Nomor Mahasiswa : 19520001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Menggugat Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Sriharjo
c. Waktu : 10 Januari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 10 Januari 2023



PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 029/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 10 Januari 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Aisyah Fajar Rochani
No Mhs : 19520001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Menggugat Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sriharjo
Tempat : Kelurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Januari 2023





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 516989 - Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aisyah Fajar Rochani
Nomor Mahasiswa : 19520001
Judul :
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanto, M.Si
Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
27/10/22	Penyusunan arah penelitian	
02/11/22	Arahan pendalaman latar belakang Masalah	
30/11/22	Pembahasan perkembangan skripsi dan arahan teori	
09/12/22	Cara penulisan LBM.	
14/12/22	arahan latar belakang hingga fokus penelitian.	
30/12/22	Pengarahan kerangka konseptual dan hingga Ringkasan data dan pedoman wawancara.	
06/01/2023	kerangka konsep dan daftar pertanyaan.	
18/05/2023	presentasi prakualifikasi hasil penelitian	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO**

ꦏꦏꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦒꦶꦂꦶ
ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦺꦴꦫꦶꦗꦺ

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55782
Website : <https://sriharjo.bantulkab.go.id/> e-mail : desa.sriharjo@bantulkab.com

SURAT KETERANGAN IZIN

Nomor : 015/ PLYN / SHJ / 1 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P.

Jabatan : Lurah Sriharjo

Berdasarkan Surat Izin dari Program Studi Ilmu Pemerintahan perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini kami berikan ijin kepada mahasiswa Atas nama Aisyah Fajar untuk melakukan penelitian di Kalurahan Sriharjo dengan judul "Menggugat Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Kalurahan Sriharjo".

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sriharjo, 3 Februari 2023

Lurah Sriharjo,

LURAH
SRIHARJO

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P

PEDOMAN WAWANCARA BARU

MENGGUGAT REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN SRIHARJO

Pemerintah Kalurahan	
Narasumber	Pertanyaan
1. Lurah	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana arah pembangunan di Kalurahan Sriharjo?2. Bagaimana partisipasi masyarakat umum terhadap pembangunan di Kalurahan Sriharjo? Baik secara pribadi maupun kelompok?3. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kalurahan Sriharjo?4. Mengapa Kalurahan Sriharjo masuk dalam kategori Desa Prima?5. Bagaimana dinamika pelaksanaan Desa Prima?6. Bagaimana partisipasi perempuan dalam Lembaga kemasyarakatan desa?7. Bagaimana cara lurah dalam mengakomodir suara masyarakat terkhusus perempuan selain dalam musyawarah kalurahan?8. Bagaimana relasi pemerintah kalurahan dengan lembaga kemasyarakatan desa kaitannya dalam mengakomodir kepentingan perempuan?9. Seberapa penting menyelenggarakan pemerintahan yang responsif gender?10. Bagaimana pandangan Lurah terkait kehadiran perempuan dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa?

<p>2. Kamituwo (Pemberdayaan perempuan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana partisipasi masyarakat umum terhadap pembangunan di Kalurahan Sriharjo? Baik secara pribadi maupun kelompok? 2. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kalurahan Sriharjo? 3. Bagaimana pemberdayaan perempuan yang ada di Kalurahan Sriharjo? 4. Bagaimana partisipasi perempuan dalam Lembaga kemasyarakatan desa? 5. Bagaimana dinamika pelaksanaan Desa Prima? 6. Bagaimana relasi pemerintah kalurahan dengan lembaga kemasyarakatan desa kaitannya dalam mengakomodir kepentingan perempuan? 7. Seberapa penting menyelenggarakan pemerintahan yang responsif gender? 8. Bagaimana relasi kamituwo dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa Prima kaitannya dengan pemberdayaan perempuan?

Lembaga Kemasyarakatan Desa
(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Narasumber	Pertanyaan
<p>1. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pentingnya kehadiran PKK bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kalurahan Sriharjo? 2. Persoalan apa saja yang sering disampaikan kepada anggota/pengurus terhadap permasalahan perempuan? 3. Bagaimana merespon persoalan perempuan di Kalurahan Sriharjo? 4. Faktor pendukung apa saja yang dapat mengurangi persoalan perempuan? 5. Apa saja bidang-bidang yang ada dalam kelembagaan PKK? 6. Sejauh ini kegiatan apa saja yang sudah berjalan di PKK? 7. Bagaimana keterlibatan PKK dalam merencanakan Pembangunan Desa?
<p>2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana partisipasi masyarakat umum terhadap pembangunan di Kalurahan Sriharjo? Baik secara pribadi maupun kelompok? 2. Bagaimana proses yang dilakukan dalam menjaring aspirasi perempuan? 3. Apakah ada perbedaan tugas BPKal perempuan dan laki-laki? 4. Seberapa penting menyelenggarakan pemerintahan yang responsif gender? 5. Bagaimana relasi BPKal dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa? 6. Bagaimana dinamika dalam musyawarah Kalurahan? 7. Terdapat keterwakilan perempuan, kira-kira dalam pelaksanaannya bagaimana?

	8. Bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan dengan BPKal kaitannya dengan pelaksanaan arah pembangunan di Sriharjo?
3. Karang Taruna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana partisipasi pemuda dalam pembangunan di Kalurahan Sriharjo? 2. Bagaimana dinamika dalam Musyawarah Kalurahan terkait suara dari Karang Taruna? 3. Bagaimana arah pembangunan di Sriharjo? 4. Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Karang Taruna? 5. Seberapa penting menyelenggarakan pemerintahan yang responsif gender? 6. Apakah pernah mendengar atau mengalami permasalahan yang dialami teman-teman muda perempuan? Misalnya dikesampingkan dalam forum, dll. 7. Apa alasan bergabung ke dalam Karang Taruna? 8. Bagaimana relasi Karang Taruna dengan pemerintah Kalurahan Sriharjo? 9. Sejauh mana keterlibatan pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Sriharjo?

Undang-Undang Keistimewaan (Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya)	
Narasumber	Pertanyaan
1. Pengurus Desa Prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa ingin terlibat dalam Desa Prima? Keinginan sendiri atau orang lain? 2. Apa saja bidang yang ada di Desa Prima? 3. Apa dasar pembuatan program terhadap Desa Prima? 4. Bagaimana respon anda menanggapi persoalan perempuan di Kalurahan Sriharjo? 5. Kendala apa yang pernah dialami dalam menjalankan kegiatan/aktivitas Desa Prima? 6. Apakah anda memahami betul bidang-bidang dalam Desa Prima? 7. Apa tugas dan tanggungjawab anda sebagai anggota dan pengurus Desa Prima? 8. Bagaimana dinamika Kerjasama dalam organisasi baik antar anggota maupun pertanggungjawaban terhadap Pemerintah Kalurahan Sriharjo? 9. Bagaimana implementasi program kegiatan? 10. Bagaimana relasi dengan PKK dan Pemerintah Kalurahan dalam menjalankan roda organisasi? 11. Sejauh mana memahami persoalan perempuan di masyarakat? 12. Apa yang perlu diperbaiki dalam Desa Prima?

	13. Bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran Desa Prima?
--	--

Masyarakat Kalurahan	
Narasumber	Pertanyaan
1. Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah mengetahui arah pembangunan di Sriharjo? 2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan Kalurahan? 3. Bagaimana dalam proses menyampaikan aspirasi masyarakat? 4. Sejauh mana ruang musyawarah dihadirkan untuk kepentingan saudara/i atau masyarakat baik pribadi maupun kelompok? 5. Apa yang diketahui soal Desa Prima? 6. Bagaimana dampak dari Desa Prima yang dirasakan saudara? 7. Bagaimana pandangan saudara terkait perempuan di Kalurahan Sriharjo? 8. Apa saja permasalahan perempuan yang muncul dari kacamata masyarakat? 9. Apakah pernah mengadukan persoalan perempuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa? 10. Apakah kehadiran perempuan dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa Prima mampu menjawab

	<p>persoalan masyarakat terkhusus perempuan?</p> <ol style="list-style-type: none">11. Seberapa penting penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang memikirkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan?12. Hal apa yang perlu diperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan ?
--	--